



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA BARAT

ISSN-SNAB-2252-3936



PROCEEDINGS

**PROFESIONALISME AKUNTAN MENUJU
SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE**

KAMIS, 20 JULI 2017 | BANDUNG, JAWA BARAT

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH KOTA BEKASI

(Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Kerja Pemerintah Kota Bekasi)

Mokhamad Idham Rosyadi¹, Sri Mulyani²
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjadjaran
m.idhamrosyadi@gmail.com
s.mulyani@unpad.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to analysis and test factors that be expected have influence on implementation level of at level of implementation accrual based for government accounting.

Data collecting for this research using primary data, used questionnaire. The questionnaire was delivered to 30 agencies at City Government of Bekasi. Every agency got two questionnaires then total of questionnaires delivered and can be processed 60 questionnaires. Hypothesis testing used multiple linier regressions analysis.

The results of this research indicate that level of implementation of accrual based of government accounting at Bekasi City is excellent. In particular, level of educational staff factor, task complexity and leader coordination have a significant influenced on level of implementation accrual based of government accounting at Bekasi City. on the other side, staff training factor and conflict have not a significant influence.

Keywords : *government accounting, public sector accounting, accrual based accounting, implementation accrual based.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik yang berada di beberapa negara seperti Italia, New Zealand, Australia, dan lainnya telah melakukan reformasi terhadap proses pengakuntansian dalam pembuatan laporan keuangan pemerintahan dan dalam manajemen sektor publik. Seluruh negara dibelahan dunia mulai melakukan perubahan terhadap organisasi sektor publik dengan beralih dari sistem manajemen tradisional sektor publik menjadi manajemen sektor publik yang baru yang bisa disebut sebagai New Public Management (NPM).

Penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013. Dalam penerapan basis akrual dalam belum sepenuhnya dapat dijalankan karena tidak semua anggota instansi pemerintahan memahami pencatatan laporan keuangan berbasis akrual dan tidak semua memiliki pendidikan akuntansi. Selain itu, penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan baru berjalan tanggal 1 januari 2015 lalu, sehingga susah bagi seluruh instansi pemerintahan menguasai dan memahami akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Menurut Controller and Auditor General Selandia Baru dalam penelitian Buhr (2010), memberikan saran terdapat enam faktor yang dapat membawa perubahan dalam pelaporan pemerintahan, yaitu :

1. *key people – both elected and public service leaders had changed;*
2. *axial principles – a robust framework of guiding principles was agreed;*

3. *communicating ideas – collaboration was achieved though communication;*
4. *contextual determinants – economic and technological factors made the change both necessary and possible;*
5. *ethos – there was a receptive attitude to reform amongst different people in different sectors; and*
6. *knowledge – this included university training and experience in the private sector.*

Tabel 1 Opini Laporan Keuangan Jawa Barat

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
12	Prov. Jawa Barat													
	LKPD		27		27		27		27		27		28	
1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	185	Kota Bekasi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Pada Tabel 1 terlihat bahwa selama periode 2009 sampai 2013 Kota Bekasi mendapatkan opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2009, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2010 sampai 2013. Terlihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi masih belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian ini mencoba mengkonfirmasi penelitian Buhr (2010) mengenai faktor-faktor yang membawa perubahan pada pelaporan di pemerintahan, untuk kasus pelaporan keuangan di pemerintah daerah, khususnya tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini karena pelaporan keuangan di instansi pemerintahan Indonesia baru menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh pada tahun anggaran 2015. Penelitian terdahulu mengenai topik ini sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian terdahulu lebih banyak befokus pada pengaruh faktor-faktor tersebut pada kualitas laporan keuangan. Selain itu dalam penelitian ini juga menambahkan faktor kompleksitas tugas dan konflik yang akan dianalisis.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- Seberapa besar pengaruh faktor tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pemimpin terhadap tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para pejabat pengelola pemerintahan untuk memerhatikan faktor –faktor yang dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual ini diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan.

2. TEORI

Teori *New Public Management (NPM)*

Istilah *New Public Management* pada awalnya diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. NPM menurut Mardiasmo (2002) merupakan perubahan manajemen dalam sektor publik dimana untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan – perusahaan publik.

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Tabel 2 Perbedaan Laporan Keuangan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) • Neraca • Laporan Arus Kas • Laporan Operasional • Laporan Perubahan Ekuitas • Catatan Atas Laporan Keuangan

Tingkat Pendidikan Staf

Menurut Mathis (2010:5) menjelaskan bahwa tujuan lain dalam manajemen sumber daya manusia yang difokuskan adalah human capital yang merupakan total nilai dari sumber daya manusia terhadap organisasi. Total nilai yang dimaksudkan adalah seberapa besar kemampuan intelektual yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan mereka.

Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- 1) Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- 3) Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Kompleksitas Tugas

Kompleksitas kata dasarnya kompleks, diambil dari kata *complex* artinya rumit, sedangkan kompleksitas artinya kerumitan. Untuk memperoleh pengertian dasar, semula para peminat studi kompleksitas memberi batasan bahwa kompleksitas pada prinsipnya suatu keadaan antara keteraturan dan kesemrawutan (*a condition between order and chaos*). Ada perubahan yang membawa unsur-unsur baru sehingga terjadi ketidaksederhanaan, ketidakbiasaan, dan ketidakknormalan.

Menurut Jamilah dalam Fitriani (2012:4) menjelaskan terdapat dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas dan stuktur tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur tugas terkait dengan kejelasan informasi (*information clarity*).

Pelatihan Staf

Individu-individu yang terdapat sebuah organisasi tentu harus memiliki potensi-potensi yang diperlukan organisasi tersebut demi mencapai tujuan. Menurut Noe (2010:5) Pelatihan merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan berdasarkan kompetensi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Kompetensi pekerjaan yang harus dimiliki termasuk didalamnya pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), atau perilaku (*behaviour*) yang sangat penting untuk keberhasilan kinerja pegawai.

Konflik

Menurut Gibson, et al (2004: 250), hubungan selain dapat menciptakan kerja sama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

Menurut Burns and Scapens dalam Stamatiadis (2000) menyarankan bahwa dalam menimbang keberhasilan untuk implementasi perubahan didalam sebuah organisasi melalui pemeriksaan dari identifikasi konflik organisasi yang potensial dan diperlukan.

Koordinasi Pimpinan

Sebuah organisasi berjalan tidak berdasarkan pekerja-pekerja didalamnya saja, namun juga adanya pemimpin yang selalu mengarahkan bawahannya untuk bekerja sesuai dengan jalur atau strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Robbins dalam Herlina (2013:6) mengemukakan sikap atau perilaku anggota organisasi pada umumnya dipengaruhi oleh sistem nilai dan yang dianut dalam organisasi dan dipengaruhi pula oleh perilaku pimpinannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *exploratory research* dengan pendekatan survei. Penelitian *exploratory* dilakukan dimana sangat sedikit pengetahuan atau informasi yang tersedia mengenai subjek investigasi (Sekaran, 2009:119). Survei dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari populasi melalui beberapa pertanyaan. Sampel dari penelitian ini adalah 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, karena Pemerintah Kota Bekasi memiliki laboratorium aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, peneliti juga pernah melakukan observasi mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Bekasi.

Variabel Dependen

Tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Kesesuaian tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dapat diketahui dan diukur dengan menggunakan metode indeks, metode indeks

digunakan untuk menangkap beragam rangkaian reformasi menjadi indikator yang mudah dipahami. Metode indeks yang digunakan dalam variabel ini didasarkan atas 45 basis akuntansi dan karakteristik yang ditetapkan oleh PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang berlaku pada tahun 2015. Indeks pada penilaian variabel tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan ini terdiri dari 14 elemen yang masing-masing elemen diukur secara dikotomis dan responden diminta menjawab “YA” (nilai=1) jika sudah diterapkannya sistem akuntansi sesuai SAP yang berlaku dan “TIDAK” (nilai=0) jika belum diterapkan.

Variabel Independen

Tingkat pendidikan staf yang dimaksud pada penelitian ini adalah rata-rata tingkat pendidikan staf atau pegawai berdasarkan sejauh mana pemahaman staf keuangan mengenai ilmu akuntansi yang berbasis akrual dan akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dan masing-masing pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5, dimana jawaban dengan skala terendah menunjukkan tingkat pemahaman terhadap ilmu akuntansi masih sangat rendah..

Kompleksitas tugas sebagai variabel independen akan diukur dengan kesulitan tugas dan struktur tugas. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana pada skala terendah menunjukkan masih banyaknya kesulitan tugas dan buruknya struktur tugas sedangkan skala tinggi menunjukkan sudah baiknya struktur tugas dan tidak adanya kesulitan tugas.

Pelatihan staf sebagai variabel independen akan diukur dengan konsep Materi Pelatihan, Pelatih (Trainer), Fasilitas Pelatihan, dan Output yang Diterima Staf. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana pada skala terendah menunjukkan belum efektifnya pelatihan staf yang dilakukan sedangkan skala tinggi menunjukkan sudah efektifnya pelatihan staf yang dilakukan pada pemerintahan Kota Bekasi.

Konflik sebagai variabel independen akan diukur dengan konsep yang dikemukakan dalam penelitian

Herlina (2013:6), yaitu : Kebiasaan Aturan Lama, Ketidaktahuan Akan Perubahan dan Resistensi Terhadap Perubahan. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana pada skala terendah menunjukkan bahwa staf sudah bisa menerima perubahan peraturan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, sedangkan skala tinggi menunjukkan bahwa staf masih belum bisa menerima perubahan peraturan basis akrual pada akuntansi pemerintahan.

Koordinasi pimpinan sebagai variabel independen akan diukur dengan konsep komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan pengawasan yang efektif serta kontinuitas. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala 1 sampai 5 dimana pada skala terendah menunjukkan masih kurangnya komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan pengawasan yang efektif serta kontinuitas. Sedangkan skala tinggi menunjukkan sudah baik komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan pengawasan yang efektif serta kontinuitas.

Kuesioner untuk masing-masing faktor yang akan dianalisis dalam penelitian ini, dikembangkan dengan sebagian besar menggunakan kuesioner yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Untuk mendapatkan data yang relatif tidak bias, terlebih dahulu dilakukan uji validitas atas kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat seberapa besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan melalui analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai

berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan

X1 = Tingkat pendidikan staf

X2 = Kompleksitas tugas

X3 = Pelatihan staf

X4 = Konflik

X5 = Koordinasi pimpinan

a = Konstanta

bX = slope regresi atau koefisien regresi dari XX

e = kesalahan residual

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dengan uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (meliputi uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas). Selain itu, pengujian hipotesis yang akan dilakukan meliputi uji F atau uji signifikansi simultan dan uji t uji signifikansi parameter secara individual.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan basis akrual dan penerapan basis akrual yang diterapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebanyak 43 SKPD untuk Tahun Anggaran 2015. Penyebaran kuesioner hingga pengembalian memerlukan jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Kuesioner dibagikan kepada Sub-Bagian Keuangan dari 31 Dinas dan Badan + 1 Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kota Bekasi dan masing-masing akan menerima 2 kuesioner.

Tabel 3 Data Responden

Item	Jumlah Responden	Jumlah Kuesioner
PPKD	1	2
SKPD (Dinas & Badan)	31	62
Total Penyebaran Kuesioner	32	64
Kuesioner yang kembali	30	60
Persentase kuesioner yang kembali	94%	94%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 3 menyajikan informasi jumlah kuesioner yang kembali yaitu berjumlah 60 kuesioner yang terdiri dari 29 SKPD dan 1 PPKD (94%) dari total 31 SKPD dan 1 PPKD. Terdapat 2 SKPD (6%) yang tidak memberikan konfirmasi dan pengembalian kuesioner yang diberikan.

Statistik Deskriptif

Tabel 4 Statistik Deskriptif untuk Variabel Dependen

Indeks Tingkat Penerapan	Cronbach's Alpha	Mean (Jawaban "YA")	Mean (Jawaban "TIDAK")
Penerapan Basis Akrua	0,967	55,69	4,31
Penerapan Basis Akrua (%)		92,82 %	7,18%

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Tabel 4 menunjukkan pengukuran statistik deskriptif untuk variabel tingkat penerapan akuntansi akrual. Adapun nilai rata-rata untuk tingkat penerapan akuntansi akrual dengan jawaban "YA" atau berarti sudah diterapkannya PP No.71 Tahun 2010 sebesar 92.82%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kota Bekasi sudah sangat baik.

Tabel 5 Statistik Deskriptif untuk Variabel Independen

Variabel	Skor Aktual	Skor Ideal	%
Tingkat Pendidikan Staff	716	1200	59,67%
Kompleksitas Tugas	1230	1500	82,00%
Pelatihan Staff	1938	2100	92,29%
Konflik	1131	1800	62,83%
Koordinasi Pimpinan	1226	1500	81,73%

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Pada table 5 untuk variabel tingkat pendidikan staf tergolong dalam kategori cukup baik dan menjelaskan bahwa tingkat Pendidikan staf sudah cukup bagus dalam menunjang aktivitas pemerintahan dan dapat dilihat dengan skor aktual sebesar 716 dan skor ideal sebesar 1200 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 59,67%.

Untuk variabel kompleksitas tugas tergolong dalam kategori baik dimana responden beranggapan tugas yang diterima tidak terlalu kompleks untuk dikerjakan dan dapat dilihat dengan skor aktual sebesar 1230 dan skor ideal sebesar 1500 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 82,00%.

Untuk variabel pelatihan yang telah dilakukan sudah sangat baik dalam memberikan nilai tambah bagi responden sendiri dan dapat dilihat dengan skor aktual sebesar 1938 dan skor ideal sebesar 2100 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 92,29%.

Untuk variabel konflik tergolong dalam kategori cukup baik dimana responden beranggapan konflik yang terjadi dapat kemungkinan masih bisa diatasi sehingga tidak mengganggu pekerjaan dan dapat 79 dilihat dengan skor aktual sebesar 1131 dan skor ideal sebesar 1800 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 62,83%.

Untuk variabel koordinasi pimpinan masih berjalan untuk memberikan instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh staf-stafnya dan dapat dilihat dengan skor aktual sebesar 1226 dan skor ideal sebesar 1500 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 81,73%.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	217,243	5	43,449	14,816	,000 ^b
	Residual	158,357	54	2,933		
	Total	375,600	59			

a. Dependent Variable: Tingkat Penerapan Basis AkruaI (Y)

b. Predictors: (Constant), Koordinasi Pimpinan (X5), Kompleksitas Tugas (X2), Konflik (X4), Tingkat Pendidikan Staf (X1), Pelatihan Staf (X3)

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 14,816 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimana pada tabel F untuk $\alpha = 0,05$ dan df1: 5 dan df2: n-k-1 (60-5-1) = 54, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,386. Karena Fhitung (14,816) lebih besar dibanding Ftabel (2,386) maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pimpinan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerapan basis akruaI.

Tabel 7 Hasil Pengujian Model Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34,050	2,985		11,407	,000
	Tingkat Pendidikan Staf (X1)	,480	,119	,420	4,044	,000
	Kompleksitas Tugas (X2)	-,283	,111	-,235	-2,553	,014
	Pelatihan Staf (X3)	,066	,076	,107	,861	,393
	Konflik (X4)	-,205	,124	-,183	-1,650	,105
	Koordinasi Pimpinan (X5)	,271	,095	,288	2,856	,006

a. Dependent Variable: Tingkat Penerapan Basis AkruaI (Y)

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 34,050 + 0,480X1 - 0,283X2 + 0,066X3 - 0,205X4 + 0,271X5$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 34,050 menyatakan bahwa jika tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pimpinan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka tingkat penerapan basis akruaI akan bernilai sebesar 34,050. Nilai variabel X1 yaitu tingkat pendidikan staf memiliki koefisien regresi sebesar 0,480, artinya jika tingkat pendidikan staf meningkat, sementara kompleksitas tugas, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pimpinan konstan, maka tingkat penerapan basis akruaI akan meningkat sebesar 0,480. Nilai variabel X2 yaitu kompleksitas tugas memiliki koefisien regresi sebesar -0,283, artinya jika kompleksitas tugas meningkat, sementara tingkat pendidikan staf, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pimpinan konstan, maka tingkat

penerapan basis akrual akan menurun sebesar 0,283. Nilai variabel X3 yaitu pelatihan staf memiliki koefisien regresi sebesar 0,066, artinya jika pelatihan staf meningkat, sementara tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, konflik, dan koordinasi pimpinan konstan, maka tingkat penerapan basis akrual akan meningkat sebesar 0,066. Nilai variabel X4 yaitu konflik memiliki koefisien regresi sebesar -0,205, artinya jika konflik meningkat, sementara tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, dan koordinasi pimpinan konstan, maka tingkat penerapan basis akrual akan menurun sebesar 0,205. Nilai variabel X5 yaitu koordinasi pimpinan memiliki koefisien regresi sebesar 0,271, artinya jika koordinasi pimpinan meningkat, sementara tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, dan konflik konstan, maka tingkat penerapan basis akrual akan meningkat sebesar 0,271.

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Parsial

Tabel 8 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	34,050	2,985		11,407	,000
Tingkat Pendidikan Staf (X1)	,480	,119	,420	4,044	,000
Kompleksitas Tugas (X2)	-,283	,111	-,235	-2,553	,014
Pelatihan Staf (X3)	,066	,076	,107	,861	,393
Konflik (X4)	-,205	,124	-,183	-1,650	,105
Koordinasi Pimpinan (X5)	,271	,095	,288	2,856	,006

a. Dependent Variable: Tingkat Penerapan Basis Akrual (Y)

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

Dari tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengujian variabel tingkat pendidikan staff (X1), nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,044. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variable tingkat pendidikan staf (X1) sebesar 4,044 > t tabel (2,005), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Secara parsial, tingkat pendidikan staf berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual (Y). Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari tingkat pendidikan staf dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Selain itu juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ouda (2008) dalam Kusuma (2013) yang menunjukkan bahwa ketika mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, staf organisasi diharapkan untuk lebih menghargai manfaat dan penggunaan teknik akuntansi yang baru dan juga untuk mengimplementasikannya kedalam organisasi pemerintah. Hal yang menyebabkan tingkat pendidikan staf berpengaruh signifikan, menurut penulis dikarenakan staf telah memiliki keahlian yang mendukung dalam pekerjaannya serta pemahan staf dalam membedakan basis kas dengan basis akrual walaupun tidak semua staf memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi

Pengujian variabel kompleksitas tugas (X2), nilai t-hitung yang diperoleh sebesar -2,553. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variable kompleksitas tugas (X2) sebesar -2,553 > t tabel ($\pm 2,005$), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Secara parsial, kompleksitas tugas berpengaruh negatif signifikan

terhadap tingkat penerapan basis akrual (Y). Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Jamilah (2007) dalam Fitriani (2012) yang menyatakan tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas tersebut, sementara struktur tugas terkait dengan kejelasan informasi (*information clarity*) dan berpengaruh dengan adanya perubahan yang membawa unsur-unsur baru sehingga terjadi ketidaksederhanaan, ketidakbiasaan, dan ketidaknormalan. Hal yang menyebabkan kompleksitas tugas berpengaruh signifikan, menurut penulis dikarenakan pembagian tugas sudah cukup baik dan secara sukarela staf mengerjakan tugas yang diberikan walaupun staf merasa tertekan dengan tugas yang banyak.

Pengujian variabel pelatihan staf (X_3), nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 0,861. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variable pelatihan staf (X_3) sebesar $0,861 < t$ tabel (2,005), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Secara parsial, pelatihan staf berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual (Y). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) dan Stamatiadis (2009) yang memperlihatkan pelatihan staf sangat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Hal yang menyebabkan hasil penelitian menjadi tidak berpengaruh signifikan menurut penulis dikarenakan masih adanya hal lain yang harus diteliti pada pelatihan staf yang dilakukan seperti sasaran yang tepat dalam pemilihan peserta pelatihan yang menyebabkan tujuan penelitian tidak efektif diterima oleh staf.

Pengujian variabel konflik (X_4), nilai t-hitung yang diperoleh sebesar -1,650. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variable konflik (X_4) sebesar $-1,650 < t$ tabel ($\pm 2,005$), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial, konflik tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual (Y). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) yang memperlihatkan konflik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan walaupun berbeda ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) dengan penulis. Hal yang menyebabkan tidak signifikkannya konflik, menurut penulis dikarenakan konflik yang terjadi pada tiap staf masih dalam lingkup individu saja, namun belum mencapai tahap konflik dengan ruang lingkup organisasi.

Pengujian variabel koordinasi pimpinan (X_5), nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 2,856. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variable koordinasi pimpinan (X_5) sebesar $2,856 > t$ tabel (2,005), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Secara parsial, koordinasi pimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual (Y). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Reddy dan Tripathi (2007:137), yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha yang sikron dan teratur dari upaya saling ketergantungan pada individu-individu untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi merupakan keberhasilan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan demi mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal yang menyebabkan koordinasi pimpinan berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan informasi yang diterima oleh staf sudah disampaikan langsung oleh pimpinan sehingga telah terjadinya komunikasi yang efektif terhadap penerapan basis akrual.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya serta pembahasan yang disertai dengan teori-teori yang mendukung mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan Kota Bekasi dengan kesesuaian penggunaan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Keseluruhan faktor mempunyai peran dan kontribusi dalam keberhasilan penerapan basis akrual pada akuntansi Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi simultan tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pimpinan secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel tingkat penerapan basis akrual sebesar 57,8% yang menjelaskan bahwa taraf dukungan faktor-faktor tersebut sudah cukup baik dalam mendukung keberhasilan penerapan basis akrual pada Pemerintah Kota Bekasi. Secara parsial, tingkat pendidikan staf berkontribusi sebesar 26,1%, kompleksitas tugas berkontribusi sebesar 9%, pelatihan staf berkontribusi sebesar 5,6%, konflik berkontribusi sebesar 5,7%, dan koordinasi pimpinan berkontribusi sebesar 11,4%. 2) Pengaruh faktor tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, pelatihan staf, konflik, dan koordinasi pimpinan secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan Kota Bekasi. Secara parsial, faktor tingkat pendidikan staf, kompleksitas tugas, dan koordinasi pimpinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan Kota Bekasi. Sedangkan untuk faktor pelatihan staf dan konflik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan Kota Bekasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya serta pembahasan yang disertai dengan teori yang mendukung, saran terkait implikasi kebijakan ditujukan kepada Pemerintah yang berhubungan dengan penerapan peraturan-peraturan baru, terutama dengan masalah akuntansi pemerintahan, diharapkan lebih memperhatikan kondisi yang ada pada unit/instansi dibawahnya serta koordinasi kepada mereka. Diperlukan juga pelatihan kepada staf untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) terkait akuntansi akrual secara rutin dan tepat sasaran dalam pemilihan peserta pelatihan. Pelatihan yang dapat dilakukan yaitu pelatihan dalam hal penjurnalan serta penyusunan laporan keuangan secara manual sehingga dapat meningkatkan pengetahuan staff terhadap proses akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu Pemerintah Kota Bekasi juga bisa mengadakan kegiatan yang dapat memberikan hubungan social yang baik antara atasan dan bawahan agar memperkecil terjadinya konflik internal.

Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya yaitu agar memperluas ruang lingkup penelitian sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang akuntansi pemerintahan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel-variabel lain yang lebih luas selain faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adventara, Gabriella Ara. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [2]. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. Jakarta.
- [3]. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015. Jakarta.

- [4]. Buhr, Nola. 2010. From Cash to Accrual and Domestic to International: Government Accounting Standard Setting in the Last 30 Years. University of Saskatchewan Saskatoon Canada, pp. 15.
- [5]. Christiaens, J. 2001. Converging New Public Management Reforms and Diverging Accounting Practices in Flemish Local Governments. *Financial Accountability & Management*. 17, 2, pp. 153-70.
- [6]. Damayanti, Etrin. (2012). Analisis Implementasi Basis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis Cash Toward Accrual Tahun Anggaran 2007 – 2009. Depok: Skripsi, Universitas Indonesia. <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20302761-S-Etrin%20Damayanti.pdf>
- [7]. Faradillah, Handi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makasar.
- [8]. Fitriani, Seni. Daljono. 2012. Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan dan Persepsi Etis Terhadap Audit Judgement. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Volume 1, nomor 1.
- [9]. Gibson, James L. 2004. *Organizations : Behavior, Structure, Processes Fourteenth Editions*. New York: McGraw-Hill.
- [10]. Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics: Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- [11]. Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris pada Kabupaten Nias Selatan). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- [12]. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 : Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- [13]. Kusuma, Muhamad Indra Yudha. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah (Studi Empiris pada wilayah kerja KPPN Semarang I). Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. 2, 3.
- [14]. Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- [15]. Lityaui. 2014. Pengaruh motivasi, pelatihan dan job analisis terhadap kinerja karyawan PT. Warni Indah Cemerlang. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.
- [16]. Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- [17]. Mathis, Robert L. Jackson, John H. 2010. *Human Resources Management, 13th editions*. Mason : South-Western Cengage Learning.
- [18]. Muhidin, Sambas Ali. Abdurahman, Maman. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [19]. Narimawati, Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media
- [20]. Noe, Raymond A. 2010. *Employee Training and Development, 5th edition*. New York: McGraw-Hill.
- [21]. Ouda, Hassan A. G. 2008. Towards a Generic Model for Government Sector Reform: the New Zealand Experience, *International Journal on Governmental Financial Management*, 8, 2, pp. 91-116.
- [22]. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis AkruaI) Republik Indonesia*. Jakarta.
- [23]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.

- [24]. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jakarta.
- [25]. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- [26]. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- [27]. Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business*. New York: John Wiley & Sons.
- [28]. Stamatiadis, F., Eriotis, N. And Vasiliou, D.2009. Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation. *International Journal of Economic Science and Applied Research*.4, 1, pp 153-184.
- [29]. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [30]. Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*, edisi kedua. Bandung: PT Refika Aditama.
- [31]. Widyastuti, Ni Made Ari. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Gianyar. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- [32]. Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.